

Dari Alienasi ke Partisipasi bagi transformasi perkotaan yang berkeadilan sosial

Pandangan seorang serikat buruh

oleh Sarinah



© Watch Indonesia! e.V.

Kota adalah magnet migrasi yang mengundang jutaan orang dari daerah pinggiran untuk merantau masuk demi meningkatkan standar hidup. Jakarta dan kota-kota satelitnya (Jabodetabek) menjadi favorit tujuan urbanisasi karena kota diapresiasi sebagai pemberi lapangan pekerjaan. Luas Jabodetabek hanya 6,4 km² atau 0,3 persen dari total wilayah di Indonesia, tetapi populasinya mencapai 29 juta atau sekitar 11 persen dari total populasi (Mendagri, 2019).

Saya tinggal di Bekasi, kota satelit utama yang terkoneksi erat dan berjarak 46 km dengan Jakarta. Glorifikasi perkotaan sebagai pemberi pekerjaan dengan upah tinggi menjadi motivasi orang-orang merantau masuk ke Bekasi, di mana 1,5 juta pekerja manufaktur hidup dan bekerja. Industri manufaktur menjadi tujuan bekerja karena penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi, upah terstandarisasi dan hanya meminta kualifikasi sekolah menengah yang mudah dipenuhi.

Meskipun Bekasi sering disindir di media sosial seolah berada di planet lain, nyatanya pemogokan buruh 27 Januari 2012 di tujuh kawasan industri utama Bekasi menimbulkan kemacetan panjang yang berimbas hingga ke Jakarta. Bekasi adalah kantong massa utama demonstrasi buruh yang rutin bertandang Jakarta. Masalah perkotaan yang paling menyolok dan rutin setiap tahun yang sama-sama dialami oleh Jakarta dan Bekasi adalah banjir, kemacetan, absennya ruang terbuka untuk anak dan kebudayaan.

Kota yang rapuh

Konsesus yang menyatakan kota dapat meningkatkan kesejahteraan telah mencapai status hegemonik. Apapun

harganya, modernisasi kota diselenggarakan secara sepihak oleh penguasa. Di Indonesia, orang bisa lebih berduka ketika sebuah pabrik bangkrut daripada melihat penggusuran hutan dan lahan pertanian. Padahal kapasitas penyerapan pekerjaan di kota sesungguhnya rapuh. Fleksibilitas 'lean manufacturing' ala Toyotisme mempertahankan sebagian besar pekerja berusia 18 hingga 30 tahun dengan jam kerja lembur yang panjang. Itulah mengapa pergantian (turn-over) pekerja manufaktur tinggi, kesempatan diangkat menjadi karyawan tetap sangat kecil. Perusahaan juga tidak perlu berurusan dengan masalah yang muncul kemudian, seperti penyakit akibat kerja.

Sejak besarnya penghasilan dianggap ukuran kesuksesan, para pekerja bersedia lembur secara sukarela jika upahnya besar. Sekalipun hal ini mengorbankan kesehatan kerja dalam jangka panjang. Kesehatan dan keselamatan kerja dibicarakan hanya sebagai prosedur. Orang akan terhentak ketika ada sebuah pabrik meledak yang membunuh puluhan pekerjanya.

Kemacetan dan transportasi publik yang tidak memadai memperpanjang jam kerja karena pekerja perlu menghabiskan waktu yang lama untuk mencapai tempat kerja dan pulang ke rumah. Pekerja Jakarta banyak yang tinggal di daerah satelit karena sewa lebih murah berdesak-desakkan di KRL setiap harinya. Motor menyemut di jalanan, mendesak pejalan kaki dan kecelakaan menjadi pemandangan rutin. Muncul humor kelam kecelakaan motor di Bekasi sudah pasti mati.

Setiap tahun kelas pekerja juga berurusan dengan banjir. Hidup di kota tanpa perencanaan, mereka berusaha untuk meninggikan rumah masing-masing dengan ha-

rapan mengurangi banjir. Pengembang perumahan tidak ambil peduli apa yang akan terjadi di kemudian hari. Rumah-rumah minimalis dibangun sebanyak-banyaknya untuk dijual kepada kelas pekerja dengan kredit perumahan selama 20 tahun. Orang-orang bekerja dan terlihat baik-baik saja, tetapi di baliknya, mereka memikirkan utang-utang karena kebutuhan lain dibiayai dengan skema yang sama.

Krisis Covid-19 dan pentingnya sumber makanan

Kelas pekerja terpukul hebat ketika Covid-19 menyerang. Jam kerja dipangkas hingga hilang sama sekali. Kehilangan pekerjaan membuat mereka kembali ke kampung halaman di desa-desa. Sebagian orang, baik di Jakarta maupun Bekasi mempopulerkan 'urban farming' untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan mereka. Badan Pusat Statistik (2021) mencatat sektor pertanian tumbuh 2,9 persen selama pandemi.

Desa dan kota saling terhubung. Desa menopang kota dari soal menyediakan sebagian suplai kebutuhan pangan dan daya dukung lingkungan. Namun, pemerintah malah mempromosikan relokasi pabrik-pabrik dari daerah Jabodetabek ke daerah-daerah Jawa Tengah yang upah minimumnya lebih rendah karena biaya hidup yang relatif masih rendah. Sebagaimana alama yang diambil sebagai *free gift*, dukungan sosial desa diambil sebagai *competitive advantage* untuk mengakumulasi lebih banyak profit

Kota-kota perlu diberi makan dan minum. Bagaimanapun juga pemerintah menyadari ancaman nyata krisis pangan, krisis air dan polusi. Langkah instan seperti impor pangan dan pengadaan ruang hijau diambil. Petani lokal dipaksa bersaing di pasar yang sudah mencapai taraf oligopoli impor yang memperpanjang jejak emisi karbon diperpanjang. Praktik korupsi kuota pangan adalah impor pangan. Pengadaan air diserahkan kepada pengelolaan swasta dan ruang terbuka hijau dibangun di atas penggusuran orang-orang tidak berdaya melengkapi keterasingan di kota.

Manusia cenderung berubah ketika krisis menghampiri mereka. Tidak selalu berubah seketika, karena begitu sulitnya menentang nilai-nilai dalam masyarakat yang ditanamkan sejak kecil dan diwariskan dari generasi ke generasi. Setidaknya orang mau memulai perubahan atau pengetahuan tentang itu hanya sekadar masuk ke alam kognitif. Krisis juga menjadi waktu yang tepat mengampanyekan nilai-nilai alternatif untuk mendapatkan lebih banyak pendengar. Krisis bisa bersifat personal, yang bisa berbeda bagi setiap orang, paling tidak dalam masa datangnya.

Kemungkinan perubahan

Di Jakarta tumbuh kesadaran tentang perlunya mengonsumsi makanan lebih banyak berbasis tumbuh-tumbuhan organik. Mereka mengorganisir diri untuk bertukar informasi dan pengalaman di grup Facebook. Mereka bukan vegetarian, tetapi jelas mereka juga memiliki aspek berkelanjutan. Banyak anggotanya hanya sekadar anggota untuk mempelajarinya bukan sebagai tindakan, tapi hanya sekadar pengetahuan.

Pola makan ini dianggap sulit karena menentang kepraktisan dan harga murah yang ditawarkan oleh pasar

makanan berbasis terigu dan gula di sekitar kita. Siapa yang bisa menentang kehendak pasar, pun pemerintah sudah mengampanyekan gizi seimbang yang lima puluh persen perlu berbasis tumbuhan. Banyak yang pada akhirnya patuh ketika berada dalam fase krisis karena menghadapi penyakit berat yang mengancam nyawa mereka.

Ketika orang ingin lebih sehat, ada tembok tebal bernama akses ke gaya hidup sehat yang lebih mahal dan kekuasaan politik beserta nilai-nilai hegemoniknya yang mengondisikan masyarakat. Mau tidak mau, kita harus berbenturan dengan politik yang mungkin memanen dukungan politik juga. Buruh Bekasi mengadvokasi kesehatan warga dengan menggunakan UU BPJS juga bisa jadi contoh. Aktivitas ini berkontribusi pada kemenangan satu calon buruh pada Pemilu legislatif 2019 silam. Advokasi kesehatan memang berkekuatan karena menyentuh orang yang berada dalam krisis hidup.

Dalam situasi krisis, manusia belajar hubungannya dengan alam, paling tidak mendekatinya. Dalam krisis Covid-19, orang belajar mereka membutuhkan pertanian. Kesakitan manusia membuat mereka belajar bahwa mereka adalah makhluk organik yang butuh hidup dengan mempertimbangkan keselarasan dengan alam yang sudah begitu lama dilupakan. Mengapa menyadari kenyataan sederhana ini sulit dicapai?

Ketika kepemilikan tanah dan isinya diambil alih oleh tuan tanah, mereka juga mentransformasikan bagaimana mayoritas yang tak memiliki tanah terhubung dengan alam (Patel & Moore, *A History of the World in Seven Cheap Things*, 2017). Kini mayoritas harus difasilitasi oleh struktur kekuasaan yang melayani kepemilikan pribadi untuk terhubung dengan alam, untuk hidup darinya. Mayoritas manusia terasing dari kekayaan sosial, satu sama lain, alam, dan dirinya sendiri yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Kelas pekerja yang mengubah bahan mentah menjadi komoditi tidak melihat dirinya terhubung dengan alam. Dalam produksi massal, mereka melihat dirinya berhubungan dengan alat-alat produksi dan sang pemiliknya. Kepentingan ekologis dipersepsi tidak saja seolah berada di luar dinamika perjuangan kelas, tetapi juga alam dimubazirkan dalam krisis produksi berlebihan.

Perjuangan kelas buruh dan perjuangan environmentalis kerap ditempatkan pada dua kutub berbeda seolah melayani dua kepentingan yang berbeda. Stefanie Barca (2012) dalam papernya "On working-class environmentalism: a historical and transnational overview" melihat kemungkinan keluarnya perjuangan buruh dari dalam pabrik untuk mempertanyakan ekologi politik dalam produksi industri dan polusi di masyarakat adalah ketika program kesehatan dan keselamatan kerja dihubungkan dengan perjuangan sosial untuk lingkungan yang sehat dan aman.

Solidaritas dan partisipasi

Kota yang berkelanjutan dibayangkan sebagai wilayah yang menjadi pusat ekonomi, padat penduduk, banyak ruang terbuka hijau, transportasi publik yang memadai, akses terhadap kebutuhan dasar, termasuk kesehatan mental, pengelolaan sampah yang baik, dan sebagainya, adalah potongan-potongan gambaran kota berkelanjutan

an. Sebagian besar bisa mungkin saja bisa dibuat secara sepihak oleh pemerintah, tetapi sarana-sarana itu hanya akan hadir sebagai simbol, parsial, individualis dan mengasingkan sebagian yang lain.

Pada periode Januari hingga September 2018, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mencatat 79 titik penggusuran. Mereka yang digusur jelas diasingkan oleh Pemerintah Kota Jakarta. Untuk melengkapi penderitaan ini, Gubernur Anies Baswedan tidak menepati janji pada masa kampanyenya bahwa dia tidak akan membangun dengan menggusur seperti para pendahulunya.

Para penolak dituding kota hijau dan bersih. Mereka juga dianggap mau tahu tentang bencana alam yang mengancam mereka sendiri. Yang mencegah mereka untuk memahaminya adalah ketidakadilan ketika ada sebagian (kecil) manusia yang tidak perlu berkorban dan tetap menikmati hak-hak istimewa mereka di bawah ancaman krisis iklim, sementara sebagian yang lain perlu menanggung biaya sosialnya.

Dalam hal ini, partisipasi jelas adalah kunci. Pemilu hanya memberikan cek kosong kepada penguasa tanpa disertai dengan penyediaan mekanisme partisipasi yang layak. Sebagian kelompok sosial berpikir tentang membangun alat politik sendiri, sebagian yang lain berkuat dalam pengorganisasian yang mendalam yang berujung pada berbagai aksi protes. Apapun itu, kesimpulan yang dicapai bersama adalah melakukan perubahan atas nama mengatasi krisis iklim di perkotaan dilakukan dengan cara berbenturan dengan kekuasaan.

Sebagai refleksi, Marcelo Lopez de Souza dalam tulisannya 'The city and the planet' mengkritik 'urbanophobes' sebagai sama berbahayanya dengan 'urbanophiles'. Ketika tendensi 'urbanophobes' tidak memperhitungkan keberadaan mereka yang bukan pekerja kota, seperti nelayan, petani, penyadap karet dan masyarakat adat, maka 'urbanophiles' yang naif berusaha membawa manusia kembali ke zaman berburu dan meramu.

Implikasinya, dibutuhkan perspektif untuk mendudukkan semua kelompok dalam pergerakan perjuangan hak

atas kota dalam dialog terus-menerus untuk mengatasi keterasingan satu sama lain serta merefleksikan bagaimana seharusnya hubungan manusia yang berproduksi menggunakan teknologinya dengan alam secara egaliter. Partisipasi dan solidaritas akan membuka kesempatan untuk membangun gerakan yang lebih solid dan sampai pada kesimpulan bersama tentang transformasi perkotaan yang mendesak di bawah bayangan krisis iklim dan kapitalisme.

Sarinah adalah anggota Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR) dan meraih gelar Master di bidang Labour Policies and Globalization dari Global Labour University, Berlin.



- Barca, S. (2012). On working-class environmentalism: a historical and transnational overview. *Interface*, 4(2), 61-80. <http://www.interface-journal.net/wordpress/wp-content/uploads/2012/11/Interface-4-2-Barca.pdf>
- LBH Jakarta. (2018). Masih Ada: Laporan penggusuran paksa di wilayah DKI Jakarta Januari - September 2018. <https://www.bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2018/10/laporan-penggusuran-jakarta-2018.pdf>
- Hantoro, J. (2020). 30 Perusahaan di Bekasi Laporkan Kasus Covid-19, Terbesar LG. <https://metro.tempo.co/read/1379864/30-perusahaan-di-bekasi-laporkan-kasus-covid-19-terbesar-lg>
- Patel R. & Moore, J. W. A. (2017). *History of the World in Seven Cheap Things: A Guide to Capitalism, Nature and the Future of the Planet*. Colingwood: Black Inc.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137530/permendagri-no-72-tahun-2019>
- Rustiadi, E., Pravitasari, A. E., Setiawan, Y., Mulya, S. P., Pribadi, D. O. und Tsutsumida, N. (2021). Impact of continuous Jakarta megacity urban expansion on the formation of the Jakarta-Bandung conurbation over the rice farm regions. *Cities*, 111, 103000.
- Souza, M. L. de (2020). The city and the planet. *City*, 1-9. http://www.mom.arq.ufmg.br/mom/02_arq_interface/2a_aula/Souza_2020_the_city_and_the_planet.pdf
- Uly, Y. A. (2021). Sektor Pertanian Buktikan Diri "Kebal" Corona [Agrar-sektor erweist sich als „immun“ gegen Corona]. <https://amp.kompas.com/money/read/2021>

Diese Publikation wurde mit finanzieller Unterstützung durch Engagement Global mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der Stiftung Nord-Süd-Brücken mit Mitteln der Landesstelle für Entwicklungszusammenarbeit, Misereor, Brot für die Welt und der Stiftung Umverteilen! erstellt.



Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung



„Für den Inhalt dieser Publikation ist allein Watch Indonesia! – Für Demokratie, Menschenrechte und Umwelt in Indonesien und Osttimor e.V. verantwortlich; die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt von Engagement Global oder des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wieder.“